

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan merupakan rangkaian kegiatan dari program-program di segala bidang secara menyeluruh, terarah, terpadu, dan berlangsung secara terus menerus dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Di samping itu, pembangunan daerah ditujukan untuk meratakan pembangunan, dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan antar daerah dengan pelaksanaan yang sesuai dengan prioritas daerah melalui pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin. Dalam mewujudkan pembangunan nasional, kebijakan pemerintah berdasarkan pada trilogi pembangunan, yaitu: a) pemerataan; b) pertumbuhan ekonomi yang tinggi; serta c) terpeliharanya stabilitas ekonomi yang makin mantap. Tekanan yang lebih menonjol diberikan pada masalah pemerataan yang menunjukkan peningkatan kehidupan dan harapan rakyat pada kemajuan pada tahapan pembangunan.

Pembangunan di segala bidang yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat melalui tahapan pelita demi pelita telah banyak membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Namun, pembangunan itu sendiri juga menyisakan berbagai persoalan dan tuntutan baru seperti kesenjangan sosial, kualitas hidup manusia, kesempatan kerja, hak asasi manusia, keterbukaan, penegakan hukum, lingkungan hidup dan masih banyak lagi.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) (Bappeda, 2009:15), pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitik-beratkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

Arsyad (1999:108) menyatakan pembangunan ekonomi (daerah) adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah (daerah) dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk memperoleh pendapatan, dan dari pendapatan ini selanjutnya akan menimbulkan daya beli masyarakat serta menimbulkan pasar yang cukup besar yang pada akhirnya penduduk akan memperoleh kesejahteraan (Mangkoesobroto, 1986:31).

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan, jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal, tetapi juga merupakan beban dalam pembangunan dan di sisi lain penduduk juga merupakan faktor penentu, karena penduduk tidak saja

berperan sebagai pelaku tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Oleh karena itu pembangunan di Propinsi Lampung diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan.

Tingkat pembangunan berhasil atau tidak dapat dilihat dari besar/kecilnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. IPM pada dasarnya adalah nilai yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

1. Kesehatan diukur dengan Usia yang Panjang dan Sehat atau diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH).
2. Pendidikan diukur dengan Kemampuan baca tulis atau Angka Melek Huruf (AMH) dan angka partisipasi pendidikan yang telah ditamatkan atau Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
3. Ekonomi diukur dengan Standar hidup yang layak dengan pendekatan Produk Domestik Bruto per Kapita pada tingkat konsumsi riil per kapita atau kemampuan daya beli masyarakat.

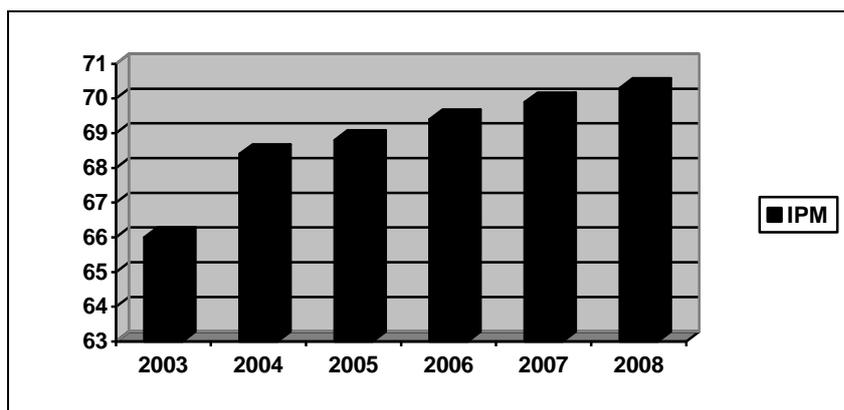
Berikut indeks komponen IPM Provinsi Lampung tahun 2003-2008, yaitu:

Tabel 1. Indeks Komponen IPM Provinsi Lampung (Persentase)
Tahun 2003-2008

Indeks Komponen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
-----------------	------	------	------	------	------	------

Indeks Kelangsungan Hidup	68,7	71,0	71,7	72,5	72,95	73,3
Indeks Pengetahuan	77,1	77,6	78,3	78,6	78,91	78,62
Indeks Daya Beli	52,3	56,6	56,4	57,1	57,79	58,26
IPM	66,0	68,4	68,8	69,4	69,89	70,30

Sumber : Balitbangda Lampung, data diolah



Sumber : Balitbangda, data diolah

Gambar 1. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Lampung Tahun 2003 – 2008

Indeks Pembangunan Manusia semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut UNDP, angka IPM ini termasuk ke dalam status menengah atas, kecuali pada tahun 2003, termasuk ke dalam status pembangunan menengah bawah. Ukuran Indeks Pembangunan Manusia ini tidak memperhitungkan aspek moralitas tetapi hanya memperhitungkan aspek fisikfitas. Aspek fisik yang dianggap cukup mewakili secara proporsional dalam ukuran pembangunan manusia adalah aspek kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan, dan aspek layak hidup melalui angka pengeluaran riil untuk konsumsi. Dengan daya tahan hidup lama manusia mempunyai peluang besar untuk meningkatkan kualitasnya melalui pendidikan baik formal maupun nonformal. Terpenuhnya ketiga aspek

kehidupan manusia ini secara optimal dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di tengah kehidupan dunia (ukuran UNDP) dan mempertinggi kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan di Indonesia termasuk Propinsi Lampung.

Penggunaan indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam kerangka pembangunan manusia, khususnya upaya pembangunan melalui pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan partisipasi penduduk dalam pembangunan. Dalam hal ini melalui program BOS dengan memberikan bantuan untuk siswa yang kurang mampu sehingga mereka bisa mengecam pendidikan dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Upaya peningkatan sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Sejarah perkembangan bangsa – bangsa di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa dalam berbagai bidang tidak semata – mata tergantung pada keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusianya yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diharapkan akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

Maka, beberapa permasalahan pendidikan seperti kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan, kualitas pendidikan, partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang makin kompetitif terus mendapat penanganan serius dari pemerintah dan diharapkan mendapatkan dukungan optimal dari seluruh komponen masyarakat.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung, sementara biaya tidak langsung meliputi biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain – lain. Program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun merupakan salah satu bentuk implementasi dari amanat Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di setiap negara, selalu ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintahan yang hanya berperan sebagai ”wasit” atau ”polisi, yang hanya berfungsi membuat undang – undang dan peraturan, kemudian menjadi peleraai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan dalam peraturan ekonomi negerinya. Dalam kancah perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilah menjadi empat peran (Dumairy, 1996:158), yaitu:

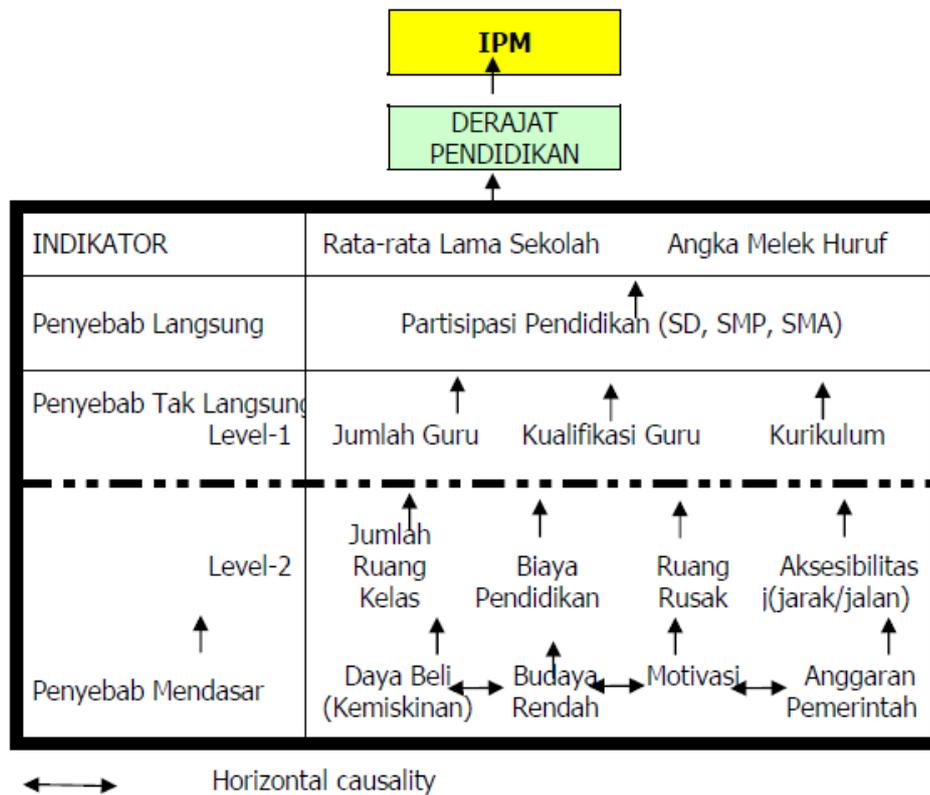
1. Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya dapat optimal dan mendukung efisiensi produksi;
2. Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar;
3. Peranan stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.
4. Peranan dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.

Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan dan kualitas SDM suatu bangsa. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah

tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya peningkatan sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa dalam berbagai bidang, tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusianya yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang unggul itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, diharapkan akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengaplikasikan keinginan tersebut. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Namun demikian pendidikan adalah suatu investasi jangka panjang yang tidak mampu menghasilkan dan berdampak seketika. Proses pendidikan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat besar.

Pemerintah melakukan program yang salah satunya adalah Program BOS. Tujuan program ini adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dengan adanya program BOS, seluruh siswa miskin dapat mengenyam pendidikan yang bermutu sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan dan menurunkan tingkat putus sekolah. Program BOS dan BKM merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam dunia pendidikan, yang secara signifikan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika tingkat putus sekolah tinggi maka nilai SDM masyarakatnya pun

rendah dan berakibat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah/negara menjadi rendah. Berikut gambar dari akar masalah pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan SDM rendah:



Sumber : [www.depdiknas .go.id](http://www.depdiknas.go.id)

Gambar 2. Akar Masalah Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat. Tingginya derajat pendidikan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya indikator-indikator pendidikan seperti tingginya angka melek huruf dan tingginya angka rata-rata lama sekolah. Agar memperoleh angka dua indikator yang tinggi tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti jumlah sekolah yang telah mencukupi untuk semua penduduk

usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar telah mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas gurupun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Kebijakan pendanaan pendidikan di Indonesia tertuang dalam PP nomor 48 tahun 2008. Pemerintah menerbitkan kebijakan yang populer untuk mengatasi putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar yaitu dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program penanggulangan putus pendidikan dasar telah banyak diterbitkan. Program yang paling populer saat ini adalah Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih dikenal dengan BOS. Tujuan pemerintah menciptakan program BOS ini adalah agar semua anak terutama dari keluarga miskin dapat mencapai kelulusan pada tingkat pendidikan dasar.

Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia (tahun 1998), pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang pendidikan. Sejak tahun 2001 sampai Juni 2005, pemerintah telah mengalokasikan sebagian dari penghematan subsidi BBM yang kemudian dialokasikan sebagai Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi keluarga miskin. Untuk periode Juli–Desember 2005, pemerintah menegaskan untuk melakukan perubahan penerima langsung dana tersebut, dari keluarga ke sekolah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS ini didasarkan pada jumlah siswa yang terdaftar dalam satu sekolah. Sejak Juli 2005, pemerintah telah menyerahkan dana BOS ke seluruh sekolah SD dan SMP, dan secara terbatas masih melanjutkan program BKM. Mekanisme alokasi bantuan yang baru ini telah banyak mengubah anggaran pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat kini medanai bagian yang cukup besar untuk biaya

operasional sekolah. Program BOS mencakup sekitar 41 juta siswa dengan rincian 62 persen berada pada jenjang sekolah dasar dan 38 persen pada pendidikan sekolah menengah pertama. Program BOS telah menyalurkan sebanyak Rp 5.3 triliun antara Juni–Desember 2005 dan selanjutnya Rp 11.12 triliun di tahun 2006, atau sekitar 25 persen dari keseluruhan anggaran pemerintah pusat untuk sektor pendidikan. Dana BOS disalurkan secara langsung ke sekolah. Sekolah harus memiliki nomor rekening bank yang akan digunakan untuk menyimpan dana tersebut untuk mencegah terjadinya kebocoran, serta untuk meningkatkan transparansi.

Bantuan Operasional Sekolah atau BOS diluncurkan berdasarkan *Join management* Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan antara Depdiknas dan Depag. Salah satu unsur dalam pendanaan pendidikan adalah Biaya Satuan Pendidikan (BSP). Salah satu unsur dalam BSP adalah biaya operasional baik personal maupun non-personal.

BOS adalah bantuan operasional sekolah yang diarahkan untuk biaya non-personal. Kebijakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajar 9 tahun. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh bertambahnya penduduk miskin akibat pengurangan subsidi BBM. Penduduk miskin ini secara finansial tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikan bagi putra-putrinya. Hal ini sungguh mengancam kesuksesan program wajib belajar 9 tahun yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2008.

Berikut data mengenai Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP di Lampung (Persentase)

TAHUN	TINGKAT SEKOLAH	
	SD	SMP
2003	107,25	83,03
2004	109,33	83,82
2005	106,8	80,35
2006	111,54	80,82
2007	109,47	82,98
2008	106,65	82,2

Sumber : BPS Lampung

Angka Partisipasi Kasar (BPS, 05/12/2009) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar anggarannya pada empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan siswa dari iuran sekolah dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal Tahun Ajaran 2005/2006. Pemerintah Lampung juga ikut melaksanakan program BOS. Dalam rangka melaksanakan amanat amandemen

UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sejak tahun 2005 pembiayaan pendidikan terus diupayakan ditingkatkan secara signifikan untuk secara bertahap mencapai 20 persen dari APBN dan minimal 20 % dari APBD.

Program BOS yang dilaksanakan antara tahun 2005 – tahun 2008 di Indonesia sudah mencapai 1,06 juta siswa untuk jenjang SD/MI, 679,3 ribu siswa untuk jenjang SMP/MTs. Sejak tahun 2005, Pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Alokasi dana BOS sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terus meningkat, yaitu Rp5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp11,9 triliun pada tahun 2008. Pada tahun 2008, BOS yang disalurkan mencapai Rp. 11,9 triliun untuk 42 juta murid sekolah SD/MI/setara dan SMP/MTs/setara, serta Rp. 358,3 Milyar untuk BOS Buku. Dana BOS rata-rata per-siswa tingkat SD sebesar Rp. 254.000/murid/tahun, sedangkan untuk SMP sebesar Rp.354.000/murid/tahun. Pada tahun 2009, pemerintah telah menaikkan dana bantuan operasional sekolah(BOS) SD/MI dan SMP/MTs sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Untuk siswa SD/MI di perkotaan dari Rp. 254.000,-/siswa/tahun menjadi Rp. 400.000,-/siswa/tahun, di kabupaten dari Rp. 254.000,-/siswa/tahun menjadi Rp. 397.000,- siswa/tahun. Bantuan Operasional Sekolah untuk SMP/MTs di perkotaan naik dari Rp. 354.000,- siswa/tahun menjadi Rp 575.000,- siswa/tahun, di kabupaten dari Rp. 354.000,- siswa/tahun menjadi Rp. 579.000,- siswa/tahun.

1.2 Permasalahan

Berbagai macam kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan pada pelajar SD dan SMP. Pada Tabel 1 terlihat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dan begitu juga dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Lampung. Tetapi, dengan semakin meningkatnya IPM, apakah program BOS memberikan pengaruh terhadap IPM di Propinsi Lampung dalam peningkatan SDM di Lampung, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini yaitu:

” Bagaimana hubungan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD-SMP dan Angka Partisipasi Kasar terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung? ”

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis hubungan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam peningkatan SDM di Lampung.
2. Menganalisis hubungan Angka Partisipasi Kasar terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung.

1.4 Kerangka Pemikiran

Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan antara lain dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata – rata masyarakatnya meningkat; usaha pembangunan juga ditandai dengan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pencapaian dua hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak.

Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung melalui peningkatan anggaran pendidikan. Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan program Gakin dan didukung oleh program-program nasional untuk daerah, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional maka dari itu, kemajuan di bidang pendidikan diharapkan dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia yang maju dan mandiri. (Mulyadi Subri, 2003:39)

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004 – 2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapat jangkauan layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah – daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat. Indikator dari penuntasan program wajib belajar 9 tahun adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Program Pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksanaan program wajib belajar. Namun demikian, dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan

bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Program BOS dan BKM merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam dunia pendidikan, yang secara signifikan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seperti yang telah dilakukan Pemerintah Jawa Barat, program BOS sangat berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setiap peningkatan IPM dibarengi dengan masuknya Program BOS yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Fungsi output berhubungan dengan sumber daya manusia dan dapat digambarkan dari skema fungsi berikut ini:

$$Q = f(N, K)$$

Di mana:

Q = output

N = tenaga kerja

K = modal

Berdasarkan fungsi di atas, N (tenaga Kerja) merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus produktif sehingga menghasilkan keluaran yang berkualitas tinggi. Cara meningkatkan SDM pemerintah melakukan program yang salah satunya adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Faktor yang mempengaruhi SDM tinggi di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan sehingga menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi.

Salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar. Angka Partisipasi Kasar ini merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk dalam proses kegiatan pendidikan formal.

Angka Partisipasi Kasar ini dapat mempengaruhi besar kecilnya indeks pengetahuan. Indeks pengetahuan merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan pada Angka Partisipasi Kasar sangat mempengaruhi indeks pengetahuan sehingga dapat menggolongkan Indeks Pembangunan Manusia ke arah yang lebih baik, meskipun masih didukung dengan indeks – indeks yang lain. Pada akhirnya Program BOS dapat mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar kemudian mempengaruhi indeks pengetahuan dan berakhir pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilihat dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia. Jadi, Penulis memperkirakan bahwa Program BOS dan Angka Partisipasi Kasar mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung sebagai andil dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu :

- Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian yang berisikan Data dan Sumber Data, Alat Analisis, dan Gambaran Umum Pendidikan Propinsi Lampung.

Bab IV Hasil Perhitungan dan Pembahasan.

Bab V Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN